

	No.Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa Dodi Putra	No. Alumni Fakultas :
a) Tempat/Tanggal Lahir: Padang / 17 April 1987 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu): Syamsir Alamsyah/ yusniar c) Fakultas: Hukum d) Jurusan: Ilmu Hukum e) No. Bp: 07140040 f) Tanggal Lulus: 9 Agustus 2012 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,02 i) Lama Studi: 4 tahun 10 bulan j) Alamat Orang Tua: Perumahan Unand BIII/12/12 Ulu Gadut Padang.			

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Dodi Putra, 07140040, Fakultas Hukum UNAND, 83 halaman,2012)

ABSTRAK

Kondisi umum penegakan hukum di Indonesia sampai dengan saat ini belum membaik, bahkan ada kecenderungan mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas. Adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Perkara-perkara yang melibatkan masyarakat marginal proses penyelesaian perkaranya begitu cepat, sementara perkara-perkara yang melibatkan masyarakat elit menjadi kabur dan pelakunya kebanyakan bebas atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari yang sepatutnya. Adapun yang menjadi masalah dalam tulisan ini adalah: a) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana Narkotika di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang. b) Sanksi pidana yang diberikan oleh hakim terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut. c) Kendala yang dihadapi oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana Narkotika dalam hal penegakannya sama dengan hukum sipil, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pengadilan, tuntutan dan putusan yang diberikan terlalu ringan. Sanksi pidana yang diberikan oleh hakim terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tidak ada ditambahkan sepertiga pidana dari yang diputuskan dan adanya kendala yang dihadapi oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anggota POLRI., baik itu dalam tahap penyidikan, penuntutan, sampai persidangan, tidak mempengaruhi proses penyidikan, penuntutan maupun sampai proses jalanya persidangan tersebut. Saran penulis dalam hal penegakan hukum seharusnya semua institusi penegak hukum harus saling bekerja sama agar tercapainya penegakan hukum dan rasa keadilan bagi semua elemen masyarakat.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: 9 Agustus 2012

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Tanda Tangan	1)	2)
Nama Terang	Prof.Dr. Elwi Danil SH., MH.	Shinta Agustin SH.MH

Mengetahui:

Ketua Bagian: Prof. Dr. Ismansyah, SH.MH Tanda Tangan _____
Alumni telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni:

	Petugas Fakultas/Universitas
No. Alumni Fakultas	Nama Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama Tanda Tangan

LAW ENFORCEMENT AGAINST MEMBERS of the POLICE who CARRIED
OUT the CRIME of NARCOTICS in the TOWN of PADANG

(Dodi Putra, 07140040, Law Faculty of Andalas University Page 83,2012)

ABSTRACT

General conditions of law enforcement in Indonesia up to this time has not improved, there is even a tendency to decreased both in quality and quantity. The existence of discrimination in law enforcement. Cases involving underprivileged checkout process, let him so quickly, while cases involving the elite society becomes blurred and the culprit most free or get a lighter sentence than is fitting. As for the problem in this article are: a) implementation of law enforcement against members of the POLICE who carried out the crime of narcotics in The District Court jurisdiction. b) criminal sanctions provided by the judge against members of the Police who carried out the crime of narcotics. c) obstacles faced by investigators, the public prosecutor, and the judge in the handling of criminal acts committed by members of the NATIONAL POLICE. The methods used in the writing of this is juridical sociological (empirical) approach to the problem by looking at and observing legal norms in force is linked with the fact that there is. Research results can be inferred that the conduct of law enforcement against members of the POLICE who carried out the crime of narcotics in it equaled penagakannya civil law, both in the level of investigation, prosecution, courts, lawsuits and reached the verdict rendered too lightly. Criminal sanctions provided by the judge against members of the POLICE who carried out the crime of narcotics pursuant to Act No. 35 of 2009 about Narcotics, and no added a third criminal from being terminated and the existence of obstacles faced by investigators, prosecutors, and judges in handling criminal acts committed members of the NATIONAL POLICE, be it in. stages of investigation, prosecution, through proceedings, does not affect the investigation, prosecution or trial until the nets are suggestions the authors in terms of law enforcement should have all law enforcement agencies must work together to achieve the rule of law and justice for all elements of society.